

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

"Planning for a better Babel"

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 910/ 52 /BAPPEDA TANGGAL 2 NOVEMBER 2016
DAN
NOMOR : 55 TAHUN 2016 TANGGAL 2 NOVEMBER 2016

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG**
Jabatan : Plt. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. a. Nama : **DIDIT SRIGUSJAYA, SH., MH.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

- b. Nama : **HENDRA APOLLO, ST., M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- c. Nama : **AMRI CAHYADI, ST.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- d. Nama : **DEDY YULIANTO, SE.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.

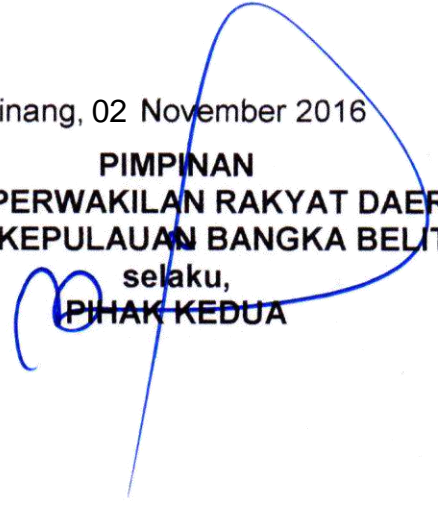
Pangkalpinang, 02 November 2016

**Pit. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
selaku,
PIHAK PERTAMA**

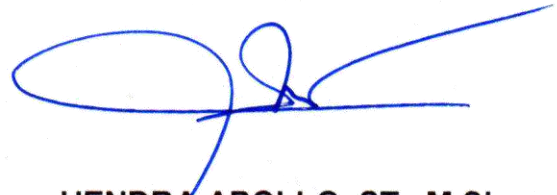


DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG

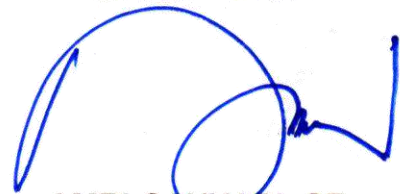
**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
selaku,
PIHAK KEDUA**



**DIDIT SRIGUSJAYA, SH., MH.
KETUA**



**HENDRA APOLLO, ST., M.Si.
WAKIL KETUA**



**AMRI CAHYADI, ST.
WAKIL KETUA**

**DEDY YULIANTO, SE.
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3 Landasan Hukum	6
1.4 Sistematika	9
BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH	10
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2014 – 2015.....	10
2.2 Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017	25
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN	
PENDAPATAN BELANJA DAERAH.....	38
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	38
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	39
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH .	40
4.1 Kebijakan Pembangunan	41
4.2 Pendapatan Daerah	47
4.3 Belanja Daerah.....	51
4.4 Pembiayaan Daerah.....	56
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2015 (juta rupiah)	11
Tabel II.2. Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2014 – 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	14
Tabel II.3. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2015	16
Tabel II.4. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014 – 2015	19
Tabel II.5. Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014 -2015	20
Tabel II.6. Laju Inflasi Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014 - 2015	21
Tabel II.7. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2014 – 2015	22
Tabel II.8. Penduduk 15 tahun ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2015 (persen)	22
Tabel II.9. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2015	23
Tabel II.10. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2015	24
Tabel II.11. Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (204 – 2015)	24
Tabel II.12. Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2014-2015)	25
Tabel II.13. Proyeksi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2017 (milyar rupiah)	27
Tabel II.14. Proyeksi Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017 Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	29
Tabel II.15. Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016 - 2017	31
Tabel II.16. Proyeksi Terhadap Distribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016 - 2017	34
Tabel IV.1. Matriks Indikator Sasaran	43

Tabel IV.2.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 s.d Tahun 2018.....	50
Tabel IV.3.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 s.d. Tahun 2018.....	55
Tabel IV.4.	Realisasi dan Proyeksi/target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s.d Tahun 2018.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2011 – 2015	15
Gambar II.2. PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2015 (dalam ribu)	17
Gambar II.3. Struktur Perekonomian menurut Lapangan Usaha Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	18
Gambar II.4. Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2014 – 2015	20
Gambar II.5. Perbandingan Angka Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional Tahun 2013 – Tahun 2015	21
Gambar II.6. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Dan Proyeksi Tahun 2011 – 2017	30
Gambar II.7. Perkembangan Pendapatan Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2015 dan Proyeksi 2016 – 2017	33



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggung jawab bagi daerah ini untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan suatu daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, maka pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga harus memperhatikan dan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional. Sebagaimana yang dimatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2017 bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah nasional. Oleh karenanya, sinergi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. KUA dan PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017, disusun berdasarkan kaidah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 yang telah disinkronkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.



Selanjutnya KUA PPAS akan dijadikan landasan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rancangan APBD. Sebagaimana yang termuat didalam Pasal 310 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan kepada kepala daerah untuk menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD.

Secara teknis, sesuai ketentuan dalam Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Rancangan KUA memuat; kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Selanjutnya dalam pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. KUA ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan DPRD Provinsi. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dengan penyusunan RAPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 sebagai dokumen penganggaran daerah yang menggambarkan kondisi keuangan daerah dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah yang termuat didalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan



permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah yang didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 yang memuat prioritas dan perkiraan pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2017, kerangka ekonomi makro nasional dan perkiraan ekonomi makro daerah yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan APBD tahun 2017, arah kebijakan yang diambil dalam pencapaian sasaran atau tujuan pembangunan, arah kebijakan anggaran, baik kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2017, serta kondisi dan prestasi yang telah dicapai tahun sebelumnya.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dengan komponen: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;



(j) pengelolaan kas umum daerah; (k) Pengelolaan piutang daerah; (l) Pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (o) Pengelolaan dana cadangan; (q) Pengelolaan utang daerah; (r) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; (t) penyelesaian kerugian daerah; (u) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan (v) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu, dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang memaduserasikan hasil Musrenbang, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, arah kebijakan Gubernur serta kebijakan dan prioritas Pemerintah Pusat.
2. Tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mulai dari tahap penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD.
3. APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (*penganggaran terpadu/unified budgeting*).
4. APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD tahun 2012-2017, sehingga dalam perencanaannya harus memaduserasikan visi, misi dan prioritas program dalam RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2012-2017 guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana anggaran disusun berdasarkan perkiraan maju (*forward estimate*) yang memperhitungkan kebutuhan dana tahun anggaran berikutnya sesuai rencana target pencapaian kinerja dalam 5 tahun.

Berdasarkan identifikasi terhadap isu strategis pembangunan pada tahun 2017 dan dengan mensinergikan prioritas pembangunan nasional dan daerah serta memperhatikan bahwa tahun 2017 merupakan tahun terakhir dari RPJMD 2012-2017 maka tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diusung pada tahun 2017 yaitu “Mewujudkan kemandirian, kemajuan, keadilan,



daya saing dan pemerataan pembangunan antardaerah, antar kawasan, perdesaan dan perkotaan”, dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 yang dijabarkan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Mengembangkan *one village one product* (OVOP) dan koperasi komoditi,
2. Penguatan *rural urban linkages*,
3. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur,
4. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun,
5. Peningkatan pelayanan kesehatan,
6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dalam
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup,
8. Fasilitasi reklamasi lahan kritis dan lahan bekas tambang,
9. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah,
10. Program SATAM EMAS,
11. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata,
12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil,
13. Pengendalian pemanfaatan ruang,

Guna mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud, maka disusun rencana program dan kegiatan tahun 2017 yang merepresentasikan upaya pencapaian RPJMD 2012-2017 dengan memuat visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.

Visi tersebut ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (*Society Empowerment*) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
5. Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean government*.

Visi dan misi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional dan kabupaten dan kota serta merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan pembangunan di daerah yang selanjutnya tercermin didalam setiap proses perencanaan dan penganggaran daerah yang dilakukan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2017 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2017.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah:

1. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2017.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 21 Seri E).



1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2017.

Bab II : Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2014 dan tahun 2015 serta perkiraan tahun 2016 dan tahun 2017.

Bab III : Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD

Menguraikan asumsi dasar yang digunakan RAPBN dan RAPBD

Bab IV : Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2017.
- b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung.
- c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Bab V : Penutup

BAB II**KERANGKA EKONOMI DAERAH****2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2014 – 2015**

Tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2017 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan. Indikator makro yang dievaluasi meliputi perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, struktur pengeluaran dalam PDRB, Inflasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, rata-rata lama sekolah, ketimpangan regional dan ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2017 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Perkembangan indikator sosial ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 – 2015 disajikan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 60.992,088 milyar, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar Rp 56.373,615 milyar sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2015 besarnya mencapai Rp 45.961,462 milyar, meningkat dari tahun 2014 yang sebesar Rp 44.159,440 milyar.

Tabel II.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2015 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	ADHK		ADHB	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.254.204	8.737.857	10.834.412	12.000.841
B. Pertambangan dan Penggalan	6.354.052	6.464.379	7.622.606	7.738.525
C. Industri Pengolahan	10.275.504	10.414.023	12.883.045	12.885.275
D. Pengadaan Listrik dan Gas	34.461	36.449	41.187	48.834
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.678	8.119	10.371	12.058
F. Konstruksi	3.551.379	3.748.038	4.711.024	5.291.650
G. Perdagangan Besar dan Eceran Motor	6.105.966	6.354.766	7.571.544	8.602.106
H. Transportasi dan Pergudangan	1.573.349	1.664.350	2.128.953	2.462.982
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.000.562	1.034.807	1.321.437	1.459.417
J. Informasi dan Komunikasi	790.872	848.950	849.135	940.707
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	766.646	799.974	998.520	1.086.052
L. Real Estate	1.413.993	1.454.363	1.836.553	1.981.642
M, N. Jasa Perusahaan	115.692	120.342	153.990	169.628
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.162.063	2.373.492	3.042.826	3.524.055
P. Jasa Pendidikan	967.552	1.061.848	1.366.491	1.649.659
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	503.757	535.128	629.863	712.368
R,S,T,U Jasa Lainnya	281.710	304.577	371.658	426.289
PDRB	44.159.440	45.961.462	56.373.615	60.992.088

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2015



Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan perikanan pada tahun 2015 berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 5,86 persen. Semula tahun 2014 sebesar Rp8.254.204 juta menjadi Rp8.737.857 juta. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian sejalan dengan program pemerintah daerah untuk mewujudkan kedaulatan pangan antara lain melalui program pencetakan sawah baru dan Program ketahanan pangan. Selain itu, pertumbuhan sektor ini disebabkan kondisi cuaca yang kondusif berdampak pada meningkatnya hasil tangkapan ikan nelayan dan meningkatnya harga lada. Sementara itu, harga komoditas perkebunan lainnya seperti karet dan CPO masih terus menurun. Kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semakin berpihak kepada lahan usaha ini, diperkirakan akan menyebabkan lapangan usaha ini akan terus mengalami pertumbuhan yang semakin baik.

Pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 1,74 persen, semula pada tahun 2014 sebesar Rp6.354.052 juta meningkat menjadi Rp6.464.379 juta pada tahun 2015. Mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan pada tahun 2014 yang tumbuh sebesar 1,99 persen. Perlambatan tersebut disebabkan oleh melambatnya ekspor dan turunnya harga timah internasional dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya serta adanya pemberlakuan Permendag yang baru yaitu Permendag No.33 tahun 2015 tentang ketentuan ekspor timah. Pada tahun 2016 dan 2017, diperkirakan sektor ini akan mengalami pertumbuhan yang juga masih tidak terlalu tinggi, jika memperhatikan trend pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir.

Sementara itu, pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 1,35 persen. Sedikit meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 1,30 persen. Adapun pada tahun 2015, PDRB sektor ini adalah sebesar Rp10.414.023 juta. Menurunnya lapangan usaha pertambangan khususnya timah sebagai komoditas utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disebabkan oleh menurunnya permintaan global dan harga komoditas timah yang masih rendah mengakibatkan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mengalami kecenderungan melambat selama beberapa tahun terakhir. Penerapan Permendag No.33 tahun 2015 tentang ketentuan ekspor timah menyebabkan beberapa industri pengolahan timah (smelter) sempat tidak berproduksi karena menurunnya pasokan bahan baku timah sehingga industri pengolahan tumbuh terbatas pada tahun 2015.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2015 4,07 persen, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 4,44 persen. Meningkatnya aktivitas perdagangan seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat jelang akhir tahun belum cukup kuat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ini secara kumulatif pada tahun 2015. Beberapa hal yang menyebabkan sektor ini tetap



tumbuh antara lain: dibukanya pusat perbelanjaan modern pada pertengahan September 2015 yang turut mendorong pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Selain itu, musim liburan sekolah mengakibatkan meningkatnya jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bangka Belitung sehingga mendorong pertumbuhan lapangan usaha perdagangan, pendaftaran kendaraan baru roda 4 (mobil dan truk) dan roda 2 sedikit membaik. Tapi disisi lain menurunnya penjualan kendaraan yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak melambatnya perekonomian dan prioritas konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan selain kendaraan yang menjadi salah satu penyebab sektor ini pada tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan.

Pada Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 5,54 persen pada tahun 2015, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2014 yang tumbuh sebesar 4,0 persen, pada tahun 2015 PDRB sektor konstruksi sebesar Rp3.748.038 juta. Pada tahun 2016 dan 2017, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang akan fokus pada pengembangan infrastruktur fisik diperkirakan akan membuat sektor konstruksi akan terus mengalami pertumbuhan yang positif.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 pada tahun 2015, mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,96 persen. Pada tahun 2015, PDRB sektor ini adalah sebesar Rp1.664.350 juta. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung dan liburan sekolah. Selain itu, pertumbuhan pada lapangan usaha ini juga disebabkan meningkatnya kegiatan pergudangan seiring dengan meningkatnya permintaan dan konsumsi masyarakat pada hari raya keagamaan seperti Tahun Baru Islam, Maulid Nabi Muhammad, Hari Raya Natal dan Tahun Baru Masehi serta musim liburan sekolah. Namun disisi transportasi, arus penumpang angkutan laut di pelabuhan Pangkalbalam dan Tanjungpandan akan mengalami penurunan. Hal tersebut ditengarai disebabkan oleh adanya alternatif moda transportasi udara yang relatif murah sehingga penumpang angkutan laut menurun dan kemungkinan disebabkan tingginya gelombang laut. Sementara penumpang angkutan udara meningkat signifikan terutama pada musim liburan dan perayaan hari-hari besar keagamaan.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum tumbuh meningkat sebesar 3,42 persen. Secara signifikan mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 7,47 persen. Pada tahun 2015, PDRB sektor penyediaan akomodasi makan minum adalah sebesar Rp1.034.807. Pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan dan minum terkonfirmasi oleh jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bangka Belitung yang masih mengalami diakibatkan oleh kondisi cuaca yang kondusif termasuk disebabkan oleh kabut asap.

Lapangan usaha non-dominan lainnya yakni lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada 2015 yaitu 9,78 persen. Lapangan usaha jasa pendidikan tumbuh sebesar 9,75 persen. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 6,23 persen dan jasa lainnya tumbuh sebesar 8,12 persen. Beberapa lapangan usaha tersebut memang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, bahkan meningkat dibandingkan tahun 2014. Namun karena kontribusi terhadap pembentukan PDRB secara akumulasi tidak besar, maka peningkatannya tidak cukup untuk meningkatkan PDRB secara signifikan.

Sementara itu, PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (region) atau disebut sebagai PDRB menurut penggunaan atau disebut PDRB menurut pengeluaran (*Gross Regional Domestic Product by Expenditure*), atau biasa juga disebut sebagai PDRB yang ditinjau dari sisi permintaan (*demand side*).

Pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran pada tahun 2015 terjadi pada beberapa komponen pengeluaran, kecuali pada perubahan inventori, ekspor luar negeri, dan net ekspor antar daerah yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,20 persen, 19,56 persen dan 27,17 persen. Penurunan ekspor luar negeri disebabkan menurunnya ekspor timah Bangka Belitung dan minyak nabati. Komponen yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) sebesar 7,03 persen diikuti impor luar negeri barang dan jasa yaitu sebesar 6,86 persen, pengeluaran dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,80 persen.

Tabel II.2
Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2015
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta rupiah)

Pengeluaran	ADHB		ADHK	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	29.321.100	32.686.683	22.405.560	23.704.163
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	339.516	389.651	261.768	280.182
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.768.626	6.339.383	4.470.518	4.669.369
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.983.531	14.330.832	9.407.028	9.817.433
5 Perubahan Inventori	1.224.294	1.167.768	884.346	873.741
6 Ekspor Luar Negeri	27.900.672	21.152.562	27.201.531	21.880.821
7 Impor Luar Negeri	1.366.238	1.392.465	1.042.267	1.113.734
8 Net Ekspor Antar Daerah	(19.797.887)	(13.682.325)	(19.429.044)	(14.150.512)
PDRB	56.373.615	60.992.088	44.159.440	45.961.462

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2015

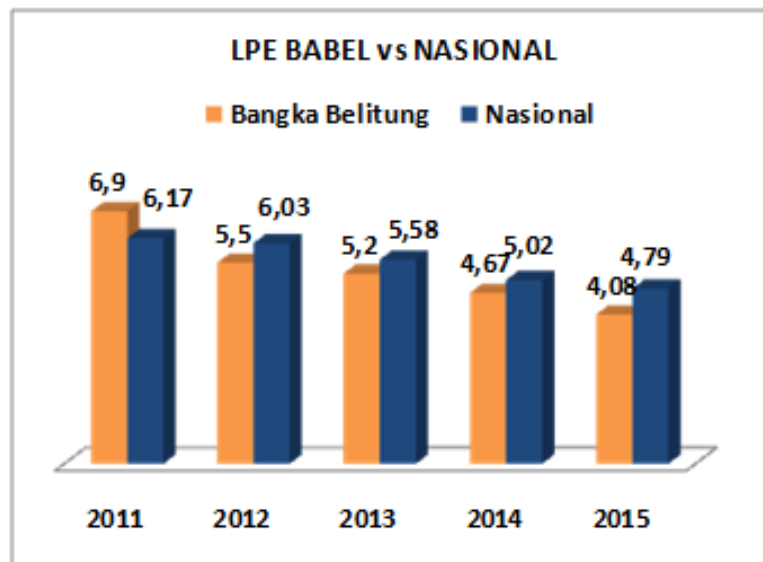
Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat dari sisi pengeluaran dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2015 yang sebesar Rp60.992,088 milyar, sebagian

besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp32.686,683 milyar. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar Rp 389,651 milyar. Komponen penggunaan lainnya meliputi konsumsi pemerintah sebesar Rp 6.339,383 milyar, pembentukan modal tambah bruto sebesar Rp14.330,832 milyar, perubahan inventori sebesar Rp 1.167,768 milyar, transaksi ekspor sebesar Rp. 21.152,562 milyar dan impor sebesar Rp 1.392,465 milyar.

Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 4,08 persen, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang sebesar 4,67 persen. *Kondisi ini terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu adanya bencana kabut asap, kemarau panjang, kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik serta terjadinya perlambatan ekonomi global dan turunnya harga minyak mentah dunia yang membawa dampak bagi perekonomian wilayah Kepulauan Bangka Belitung,*

Perkembangan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan perkembangan perekonomian nasional tahun 2011-2015 adalah sebagaimana yang disajikan pada Gambar II.1 berikut:

Gambar II.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan gambar II.1 dapat terlihat bahwa sejak tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2012-2015 tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa,



permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Kepulauan Bangka Belitung relative memiliki kesamaan. Sehingga arah kebijakan pembangunan ekonomi yang seharusnya dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun di daerah harus sejalan dan sinergis.

Berdasarkan lapangan usaha, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2014 - 2015 sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel II.3

Tabel II.3
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha		2014	2015
(1)		(2)	(3)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.22	5.86
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.99	1.74
C.	Industri Pengolahan	1.30	1.35
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9.29	5.77
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.95	5.74
F.	Konstruksi	4.00	5.54
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	4.44	4.07
H.	Transportasi dan Pergudangan	5.96	5.78
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.47	3.42
J.	Informasi dan Komunikasi	6.85	7.34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.26	4.35
L.	Real Estate	7.72	2.86
M, N.	Jasa Perusahaan	7.01	4.02
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.33	9.78
P.	Jasa Pendidikan	7.06	9.75
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.98	6.23
R, S, T, U	Jasa Lainnya	7.95	8.12
PDRB		4.67	4.08

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

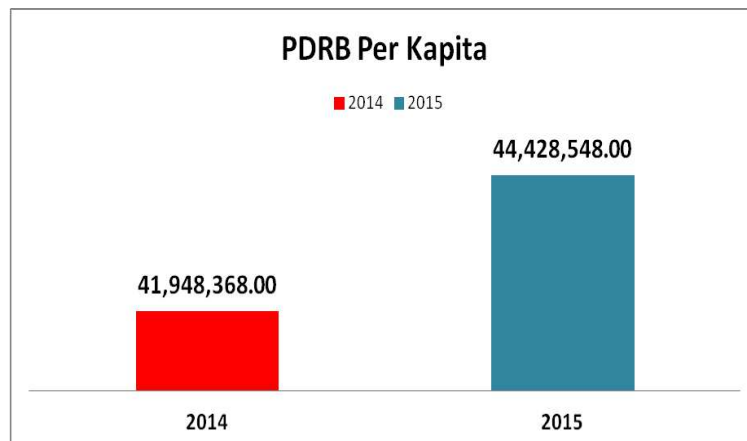
Pada tahun 2015, hampir semua sektor mengalami perlambatan, kecuali pada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada 2015 yaitu 9,78 persen. Lapangan usaha jasa pendidikan tumbuh sebesar 9,75 persen. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 6,23 persen dan jasa lainnya tumbuh sebesar 8,12 persen, Informasi dan komunikasi sebesar 7,34 persen, Pengadaan listrik dan gas sebesar 5,77 persen dan Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera pada tahun 2015 yang hanya mencapai 3,54 persen, maka pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh lebih tinggi.

2. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas. Dalam kurun waktu 2013-2015 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, PDRB perkapita penduduk berdasarkan Harga berlaku di Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp44.428.548. Adapun gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2015 adalah sebagaimana tergambar pada Gambar II.2

Gambar II.2
PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2015
(dalam ribu)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

3. Struktur Sektor Ekonomi

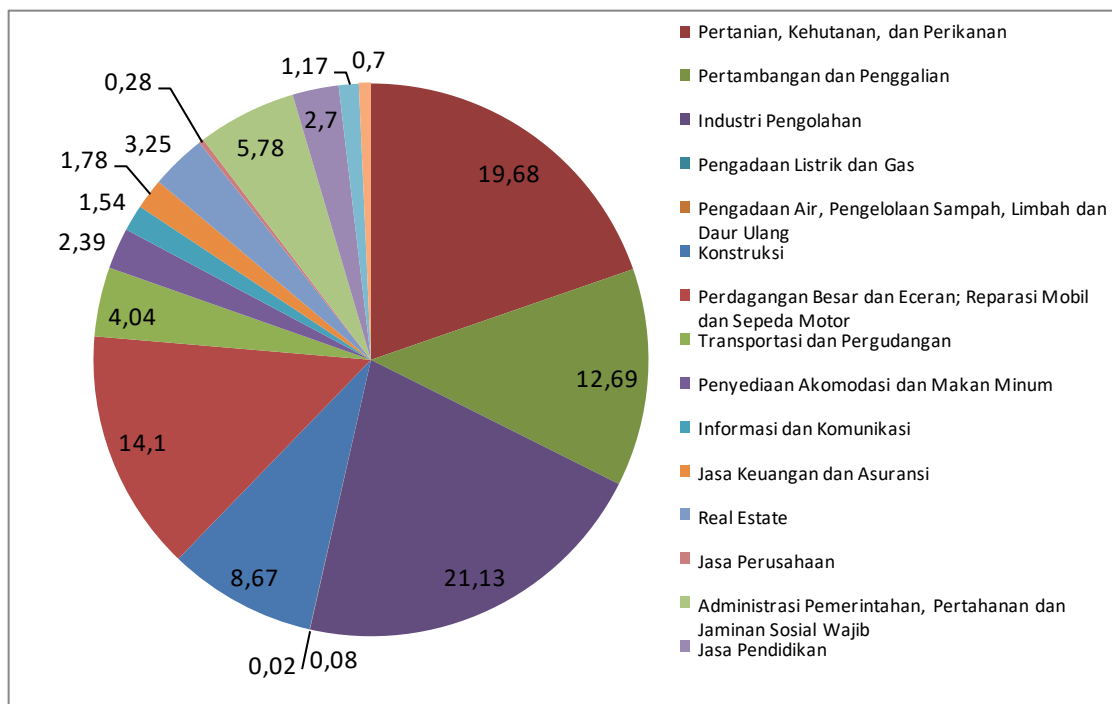
Sementara dari struktur ekonomi, dimana gambaran dari struktur ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB. Dengan demikian, diperoleh informasi sektor dominan dan sektor potensial yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut.



Pada tahun 2015 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi sebesar 21.13 persen namun mengalami penurunan dari tahun 2014 yang sebesar 22.85 persen, kemudian kontribusi yang paling tinggi setelah sektor industri pengolahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 sektor ini berada pada peringkat kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 19,68 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14.10 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 12.69 persen.

Pada tahun 2015, terjadi pergeseran struktur perekonomian, dimana sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor menggeser sektor pertambangan dan penggalian yang berada pada posisi ketiga dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gambaran mengenai distribusi persentase sektoral terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 dapat terlihat pada Gambar II.3. Struktur perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibawah ini:

Gambar II.3
Struktur Perekonomian menurut Lapangan Usaha Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)

Sementara itu, gambaran mengenai perkembangan struktur perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014-2015 adalah sebagaimana tergambar pada Tabel II.4.



Tabel II.4
Distribusi Persentase PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014–2015

Lapangan Usaha		2014	2015
(1)	(2)	(3)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,22	19,68	
B. Pertambangan dan Penggalian	13,52	12,69	
C. Industri Pengolahan	22,85	21,13	
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	
F. Konstruksi	8,36	8,68	
G. Perdagangan Besar dan Eceran Motor	13,43	14,10	
H. Transportasi dan Pergudangan	3,78	4,04	
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,39	
J. Informasi dan Komunikasi	1,51	1,54	
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	1,78	
L. Real Estate	3,26	3,25	
M, N. Jasa Perusahaan	0,27	0,28	
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,40	5,78	
P. Jasa Pendidikan	2,42	2,70	
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,17	
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,66	0,70	
PDRB	100,00	100,00	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

4. Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan oleh BPS.

Pada tahun 2015, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 4,66 persen dan Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 0,88 persen *year on year* (Desember 2015 terhadap Desember 2014), lebih rendah jika dibandingkan tingkat inflasi pada tahun 2014, dimana Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 6,81 persen dan Tanjungpandan sebesar 13,14 persen.

Gambaran perkembangan angka inflasi di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan pada tahun 2014 dan 2015 dapat terlihat pada gambar II.4 berikut:

Gambar II.4
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2014-2015



Sumber: BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Berdasarkan kelompok pengeluaran, gambaran mengenai perkembangan inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan, adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel II.5 dan II. 6 berikut:

Tabel II.5
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014-2015

Kelompok Pengeluaran	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Umum	6,81	4,66
1. Bahan Makanan	3.39	6.63
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8.63	7.92
3. Perumahan	8.85	3.74
4. Sandang	6.61	2.60
5. Kesehatan	8.13	5.50
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	6.56	8,62
7. Transportasi dan Komunikasi	6.98	-2.04

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2015

Pada tahun 2014, yang mengalami inflasi tertinggi adalah pada kelompok pengeluaran perumahan yaitu sebesar 8,85 persen yang ditenggarai semakin tingginya permintaan akan produk terkait masalah kebutuhan perumahan, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Selanjutnya diikuti kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 8,63. Sementara pada tahun 2015, angka inflasi tertinggi disumbangkan oleh kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi



dan olahraga sebesar 8,62, diikuti kelompok pengeluaran perumahan sebesar 7,92 persen.

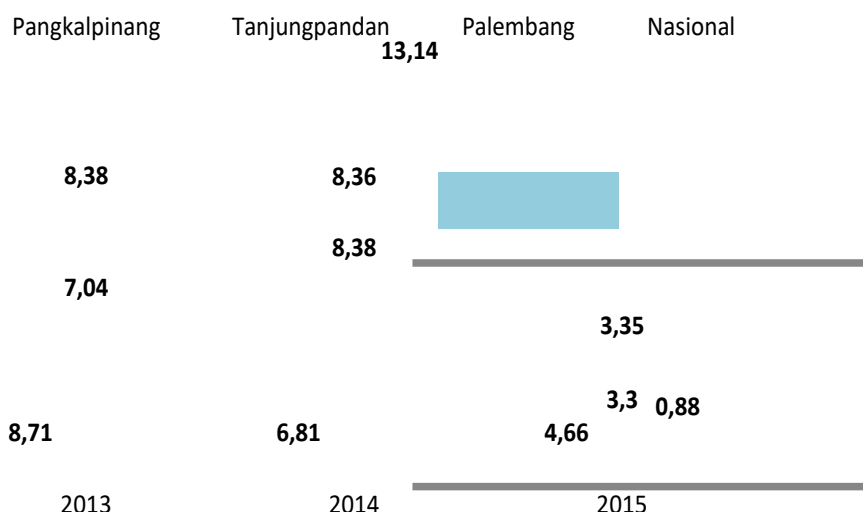
Tabel II.6
Laju Inflasi Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2014-2015

Kelompok Pengeluaran	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Umum	13.14	0.88
1. Bahan Makanan	21.36	-4.52
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6.91	4.63
3. Perumahan	6.87	2.91
4. Sandang	12.03	1.26
5. Kesehatan	4.11	3.87
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	15.35	8.07
7. Transportasi dan Komunikasi	20.47	0.42

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Pada tahun 2014 inflasi Kota Tanjungpandan mulai dihitung dan jika dibandingkan dengan inflasi nasional dan kota sekitar seperti Kota Palembang dan Kota Pangkalpinang, maka inflasi Kota Tanjungpandan paling tinggi diantara lainnya yaitu sebesar 13,14. Sementara pada tahun 2015, inflasi Tanjungpandan turun sangat signifikan hanya menjadi 0,88 persen.

Gambar II.5
Perbandingan Angka Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan,
Palembang dan Nasional Tahun 2013 – Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Catatan: Inflasi Kota Tanjung Pandan Mulai Dihitung Pada Tahun 2014

Berdasarkan diagram pada gambar II.5, maka inflasi Pangkalpinang tahun 2015 sebesar 4,66 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,35 persen dan Kota Palembang sebagai wilayah yang terdekat sebesar 3,30 persen, sedangkan Kota Tanjungpandan paling rendah dengan inflasi 0,88 persen. Kondisi ini tentunya jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2014 dimana inflasi Pangkalpinang sebesar 6,81 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi Palembang sebesar 8,38 persen dan Nasional 8,31 persen. Sedangkan Tanjungpandan justru memiliki tingkat Inflasi tertinggi 13,41 persen.

5. Ketenagakerjaan

Persentase pengangguran terbuka pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2014. TPT pada 2014 sebesar 5,14 persen menjadi 6,29 persen pada 2015.

Tabel II.7
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2014–2015

Kegiatan Utama	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,14	6,29

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2015

Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan. Penurunan produktivitas sektor pertambangan secara gradual menyebabkan meningkatnya pengangguran pada sektor ini. Hal ini tidak dapat dihindari, mengingat bahwa secara struktural penduduk yang bekerja pada sektor pertambangan ini masih cukup banyak.

Tabel II.8
Penduduk 15 tahun ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2015 (Persen)

Lapangan Pekerjaan Utama	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	28,06	31,41	36,63
2. Pertambangan	21,28	17,50	12,24
3. Industri Pengolahan	6,06	5,88	5,65
4. Listrik, Gas dan Air	0,35	0,21	0,46
5. Bangunan	4,99	5,16	4,61
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	18,49	20,45	19,68
7. Angkutan, Pergudangan & Telekomunikasi	2,90	2,86	2,91
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	1,93	2,19	2,11
9. Jasa Kemasyarakatan	15,94	14,35	15,70
Jumlah	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2015

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan pola perubahan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya walaupun ada sedikit perubahan persentase di setiap sektor. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertanian pada tahun 2015 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2014 yaitu dari 31,41 persen menjadi 36,63 persen ini dipicu karena semakin membaiknya harga lada di pasaran sehingga memberi motivasi bagi masyarakat untuk menanam lada. Namun penurunan persentase penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertambangan yaitu dari 17,50 persen tahun 2014 menjadi 12,24 persen pada tahun 2015 hal ini karena semakin menurunnya harga komoditas timah sehingga ekspor timah yang semakin menurun dan berdampak dengan berkurangnya antusias masyarakat menambang timah.

6. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 66.62 ribu orang (4,83%) jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 67.23 ribu orang (4,97%). Secara umum, selama periode tahun 2014-2015 persentase penurunan penduduk miskin sebesar 0,14 persen, sedangkan untuk garis kemiskinan tahun 2015 sebesar 529.979 per kapita mengalami kenaikan sebesar 12,8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 469.814 per kapita. Sementara indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kecenderungan naik dari 0,60 pada tahun 2014 menjadi 0,89 pada tahun 2015. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin tahun 2015 semakin menjauhi garis kemiskinan jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Tabel II.9
Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2014- 2015

No.	Uraian	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,97	4,83
2.	Jumlah Penduduk Miskin	67,23	66.620
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	469.814	529,979
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,60	0,89

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Secara keseluruhan persentase tingkat kemiskinan di provinsi kepulauan Bangka Belitung Selama periode tahun 2015 sebesar 4,83 persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah

dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dimana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah 66.620 jiwa sedangkan nasional berjumlah 28.513.57 jiwa.

Tabel II.10
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	3,35	3,37	3,47	3,04	2,77
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,91	6,69	6,97	6,84	6,83

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Untuk daerah perkotaan tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 3,04 persen menjadi 2,77 pada tahun 2015. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan di pedesaan juga mengalami penurunan sebesar 6,84 persen pada tahun 2014 menjadi 6,83 persen pada tahun 2015. Jika di lihat dari kedua data tingkat kemiskinan tersebut dapat menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan cukup tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini bisa disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa masih minim dan mayoritas masyarakat di pedesaan masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor tambang dan pertanian. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan.

7. Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang semakin Meningkat meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2014 angka indeks sebesar 0,294 dan menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,291. Penurunan indeks ini menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin mendekati merata.

Kondisi indeks Williamson yang menunjukkan kesenjangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang tergambar pada tabel II.11 berikut:

Tabel II.11
Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2014 – 2015)

Tahun	Indeks Ketimpangan Willamson
(1)	(2)
2014	0,294
2015	0,291

Sumber: Bappeda (diolah)

8. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada tabel II.12, pada tahun 2014 adalah sebesar 0,30, mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,27. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah. yang artinya pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata. Dengan angka tersebut, maka ini rasio Kepulauan Bangka Belitung menjadi angka yang terendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

Secara lengkap, kondisi angka koefisien gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel II.12.

Tabel II.12
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2014–2015)

Tahun	Koefisien Gini
(1)	(2)
2014	0,30
2015	0,27

Sumber: 2014-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung 2015

2.2 Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

Membbaiknya perekonomian secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer, sehingga berdampak positif pada peningkatan ekspor Babel yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun mengalami perlambatan, namun inerja perekonomian yang relatif baik pada tahun 2015 serta besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian Bangka Belitung pada tahun 2016 dan 2017. Peningkatan investasi yang terus berlanjut dan pertumbuhan ekspor, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak

pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor pertanian diperkirakan akan semakin menonjol dan memainkan peranan penting dalam perekonomian Bangka Belitung dimasa yang akan datang, di samping sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan.

Proyeksi mengenai beberapa indikator ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 dan 2017 disajikan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih akan melambat, hal ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi negara maju yang belum solid dan pertumbuhan negara berkembang yang cenderung menurun. Perekonomian Amerika Serikat masih belum solid sejalan dengan masih lemahnya kegiatan manufaktur dan net ekspor. Pemulihan ekonomi Eropa yang masih lemah dan mengalami deflasi mendorong berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter. Sementara ekonomi Jepang masih melambat sehingga menyebabkan Bank of Japan terus melakukan kebijakan suku bunga negatif. Disisi lain, perekonomian Tiongkok mengarah ke kondisi yang lebih stabil meski dengan risiko pelemahan masih tinggi. Harga komoditas yaitu harga minyak dunia diperkirakan cenderung menurun, akibat tingginya supply di tengah permintaan yang masih lemah. Namun demikian, harga komoditas lainnya seperti CPO, karet, dan timah mulai membaik. Harga CPO dan karet mengalami kenaikan karena adanya penurunan produksi, sementara harga timah membaik didorong oleh rencana Tiongkok untuk mengurangi produksi pada tahun 2016 ini.

Berdasarkan World Economic Outlook April 2016, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 dan 2017 diperkirakan sebesar 3,2% dan 3,5% dibandingkan proyeksi Januari 2016 yang sebesar 3,4% dan 3,6%. Perkiraan tersebut menginformasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2016 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 3,10% dan pertumbuhan ekonomi 2016 dikoreksi melambat 0,2% dibandingkan proyeksi Januari 2016. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 diperkirakan membaik menjadi sebesar 3,5% (yoy), dikoreksi melambat 0,1% dibandingkan proyeksi Januari 2016.

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 – 2017 diperkirakan mengalami moderasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan pada kisaran 5,2%-5,6% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,79%. Meningkatnya perkiraan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sejalan dengan perkiraan membaiknya kondisi ekonomi global. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih tinggi didukung oleh meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan membaiknya kontribusi ekspor dibanding tahun 2015. Investasi bangunan diperkirakan masih akan menjadi



kontributor utama dalam pertumbuhan investasi. Hal ini terutama didasari oleh mulai berjalannya proyek-proyek infrastruktur Pemerintah dan terus membaiknya investasi swasta. Sementara itu pertumbuhan ekspor diperkirakan lebih baik sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan impor juga meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Pertumbuhan ekspor diperkirakan searah lebih tinggi dari pertumbuhan impor.

Tabel II.13
Proyeksi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2017 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	ADHK		ADHB	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.326.648	9.986.538	12.524.668	13.947.267
B. Pertambangan dan Penggalian	6.571.010	6.668.560	8.104.197	7.504.454
C. Industri Pengolahan	10.561.429	10.725.870	13.140.740	13.902.414
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38.657	41.115	50.810	56.562
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.586	9.104	12.703	13.345
F. Konstruksi	3.997.097	4.268.018	5.627.209	6.044.210
G. Perdagangan Besar dan Eceran Motor	6.639.598	6.943.148	8.726.620	9.889.346
H. Transportasi dan Pergudangan	1.765.428	1.878.005	2.629.418	2.874.716
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.071.995	1.112.445	1.505.247	1.694.637
J. Informasi dan Komunikasi	911.293	979.552	978.093	1.090.695
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	836.490	876.581	1.127.647	1.210.312
L. Real Estate	1.500.038	1.549.502	2.064.157	2.290.460
M, N. Jasa Perusahaan	125.663	131.330	180.223	200.252
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.605.597	2.860.399	3.817.102	4.157.586
P. Jasa Pendidikan	1.170.508	1.290.288	1.816.458	1.972.714
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	570.119	609.261	749.448	820.444
R,S,T,U. Jasa Lainnya	330.536	358.708	457.290	500.966
PDRB	48.030.688	50.288.424	63.512.028	68.170.383

Sumber: Proyeksi BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Pada tahun 2016 dan 2017, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan semakin baik. Pertumbuhan utama masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diikuti pula dengan adanya fenomena bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2015 tidak hanya semata-mata bergantung dari sub sektor industri pengolahan logam, hal ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan semakin meningkatnya pertumbuhan sub sektor makanan, minuman dan tembakau. Gambaran mengenai proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2016-2017 dapat terlihat pada Gambar II.13.

Diperkirakan PDRB ADHK sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan meningkat menjadi Rp9.326.648 juta dan semakin meningkat menjadi Rp9.986.538 juta pada tahun 2017. Dampak dari kebijakan pemerintah yang fokus pada upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan diperkirakan mulai memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan sektor ini.

Untuk Lapangan Usaha Pertambangan pada tahun 2016 dan 2017, diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang juga masih tidak terlalu tinggi, jika memperhatikan trend pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 diperkirakan PDRB pada sektor ini akan mencapai Rp6.571.010 juta dan meningkat menjadi Rp6.668.560 juta pada tahun 2017. Permintaan dunia dan regulasi yang mengatur tentang tata kelola pertimahan diperkirakan akan menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ini.

Sementara itu, pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan tahun 2016 dan 2017, jika regulasi yang mengatur tentang ketentuan ekspor timah tidak mengalami perubahan ditambah lagi dengan adanya kondisi perkembangan eksternal yaitu rendahnya harga dan permintaan global terhadap timah maka diperkirakan pertumbuhan PDRB pada sektor ini akan tetap mengalami perlambatan, dimana pada tahun 2016 diperkirakan PDRB sektor ini adalah sebesar Rp10.561.429 juta dan Rp10.725.870 juta pada tahun 2017.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2016 dan 2017, diperkirakan akan tetap tumbuh menjadi sebesar Rp6.639.598 juta dan Rp6.943.148 juta. Beberapa hal yang menyebabkan sektor ini tetap tumbuh antara lain: dengan adanya beberapa pusat perbelanjaan modern akan turut mendorong pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Selain itu, musim liburan sekolah mengakibatkan meningkatnya jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bangka Belitung sehingga mendorong pertumbuhan lapangan usaha perdagangan, pendaftaran kendaraan baru roda 4 (mobil dan truk) dan roda 2.

Pada Lapangan Usaha Konstruksi diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp3.997.097 juta pada tahun 2016 dan Rp4.268.018 juta pada tahun 2017. Maraknya aktivitas pembangunan dibidang properti oleh pihak swasta maupun

proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah diperkirakan akan menjadi faktor pendukung tumbuhnya sektor ini.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp1.765.428 pada tahun 2016 dan sebesar Rp1.878.005 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini diperkirakan akan seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung dan liburan sekolah. Selain itu, pertumbuhan pada lapangan usaha ini juga disebabkan meningkatnya kegiatan pergudangan seiring dengan meningkatnya permintaan dan konsumsi masyarakat pada hari raya keagamaan serta musim liburan sekolah.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum pada tahun 2016, diperkirakan akan meningkat menjadi Rp1.071.995 juta dan terus meningkat menjadi Rp1.112.445 juta pada tahun 2017. Pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan dan minum terkonfirmasi oleh jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bangka Belitung yang diperkirakan akan meningkat pada tahun 2016 dan 2017 sebagai efek dari Gerhana Matahari Total yang terjadi pada tahun 2016 ini.

Lapangan usaha non-dominan lainnya yakni lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, lapangan usaha jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan dan jasa lainnya diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun karena kontribusi terhadap pembentukan PDRB secara akumulasi tidak besar, maka peningkatannya tidak cukup untuk meningkatkan PDRB secara signifikan.

Tabel II.14
Proyeksi Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta rupiah)

Pengeluaran	ADHK		ADHB	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	24.971.103	26.772.888	34.415.854	37.391.455
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	305.421	333.826	413.117	456.742
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.963.612	5.370.232	6.660.723	7.198.792
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.407.225	11.251.278	15.704.815	16.878.987
5 Perubahan Inventori	840.903	1.206.210	940.636	1.145.262
6 Ekspor Luar Negeri	25.880.821	29.995.287	28.479.676	29.933.615
7 Impor Luar Negeri	1.130.195	1.199.264	1.455.444	1.561.102
8 Net Ekspor Antar Daerah	(18.208.202)	(23.442.033)	(21.647.350)	(23.273.369)
PDRB	48.030.688	50.288.424	63.512.028	68.170.383

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016.

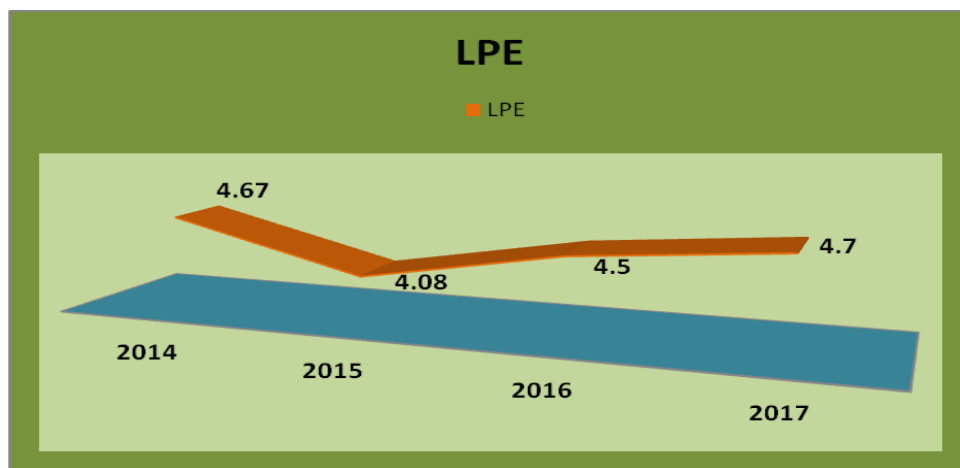
Dari sisi pengeluaran, pada tahun 2016 dan 2017 diperkirakan sumber utama pertumbuhan tetap akan bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Pelaku usaha masih terlihat optimis untuk meningkatkan kinerja dari sisi volume.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan terus menguat pada tahun 2016 dan 2017 hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya Tingkat Keyakinan Konsumen di Kota Pangkalpinang yang masih menunjukkan optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2016 dan 2017 yang masih akan terjadi dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Investasi pada tahun 2016 dan 2017 diperkirakan akan masih tetap tinggi terkait dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *rowmaterials* sumber daya mineral di Kepulauan Bangka Belitung serta adanya rencana penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis yang didukung oleh daya tarik investasi yang tinggi karena potensi sumber daya alam yang melimpah.

Ekspor 2016 dan 2017 diperkirakan akan naik seiring dengan membaiknya perekonomian dunia, penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tumbuh. Namun demikian, neraca perdagangan Kepulauan Bangka Belitung harus dijaga karena adanya kecenderungan aktivitas impor lebih tinggi daripada ekspor.

Laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif dengan kecenderungan meningkat tipis jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2016 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung akan tumbuh pada kisaran 4,2 – 4,5 persen. Sementara itu, pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh sebesar 4,3 – 4,7 persen.

Gambar II.6.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kepulauan Bangka Belitung dan Proyeksi Tahun 2011-2017



Sumber: Proyeksi Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung, 2016



Pertumbuhan utama 2016 dan 2017 diperkirakan masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diikuti pula dengan sektor industri pengolahan pada tahun 2015.

Tabel II.15
Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016 – 2017

Lapangan Usaha		2016	2017
(1)		(2)	(3)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.74	7.08
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.65	1.48
C.	Industri Pengolahan	1.42	1.56
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6.06	6.36
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.75	6.03
F.	Konstruksi	6.65	6.78
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	4.48	4.57
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.07	6.38
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.59	3.77
J.	Informasi dan Komunikasi	7.34	7.49
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.56	4.79
L.	Real Estate	3.14	3.30
M, N.	Jasa Perusahaan	4.42	4.51
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.78	9.78
P.	Jasa Pendidikan	10.23	10.23
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.54	6.87
R, S, T, U	Jasa Lainnya	8.52	8.52
PDRB		4.50	4.70

Sumber: Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan rilis pertumbuhan ekonomi triwulan I 2016 yang dikeluarkan BPS, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung hanya sebesar 3,30% (yoy), terkait dengan hal tersebut dan melihat kondisi perekonomian global yang masih melambat dan kinerja komoditas timah yang belum membaik maka Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung. Pada 2016 diperkirakan melambat dibandingkan tahun 2015 dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy) pada 2016 berada pada kisaran 3,8%-4,0% (yoy) direvisi dari proyeksi sebelumnya 4,1%- 4,5% (yoy).

Meskipun Bank Indonesia melakukan revisi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung, Namun Pemerintah Daerah tetap menargetkan pertumbuhan tahun 2016 sebesar 4,2-4,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tahun 2016-2017 dilihat dari sisi produksi, diproyeksikan masih tetap didominasi oleh sektor Jasa pendidikan, Jasa Lainnya, Administrasi Pemerintahan, Informasi dan komunikasi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kemudian sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Transportasi dan Pergudangan.



Sektor pertambangan dan industri pengolahan yang berbasis timah juga diperkirakan tumbuh meningkat. Harga komoditas timah ke depan diperkirakan membaik didorong oleh rencana Tiongkok untuk mengurangi produksi timah hingga 17 ribu ton pada tahun ini. Ekspor timah diperkirakan mulai meningkat sejalan dengan mulai membaiknya harga timah. Kebijakan pembatasan ekspor timah dan pengetatan ekspor timah sesuai dengan Permendag No. 33 Tahun 2015 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 mengatur asal-usul barang, wajib *Clear and Clean* (CnC), mekanisme ekspor, kewajiban melunasi iuran tetap dan royalti termasuk tunggakan sebelum ekspor timah dalam jangka pendek diperkirakan akan menurunkan kinerja timah namun dalam jangka panjang akan berdampak positif.

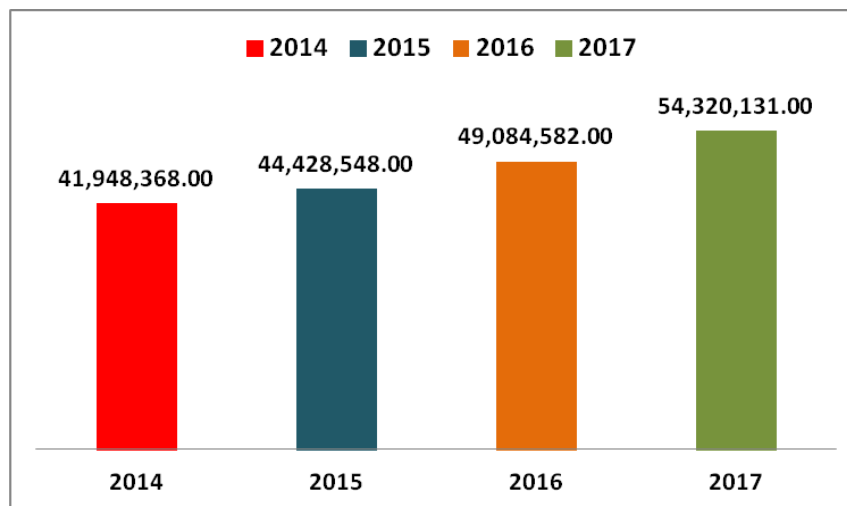
Lapangan usaha pertanian diperkirakan sedikit meningkat didukung meningkatnya produksi padi dan membaiknya harga CPO, karet dan lada. Harga CPO, karet, dan lada yang berangsur membaik menjadi insentif bagi pertumbuhan ekspor komoditas tersebut, Namun demikian, risiko perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor berpotensi menurunkan permintaan terhadap ekspor. Sementara itu, produktivitas padi diperkirakan meningkat seiring dengan bertambahnya luas panen dan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produksi pangan di Bangka Belitung dalam rangka menurunkan ketergantungan pasokan dari daerah lain. Namun demikian, risiko yang mungkin timbul antara lain, masih lemahnya permintaan global menyebabkan ekspor melambat, selain itu terjadinya El Nino pada 2015 diperkirakan berimbas pada pola tanam di beberapa daerah sentra produksi sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran panen. Beberapa program Pemerintah Daerah terkait pengembangan lapangan usaha pertanian antara lain pencetakan sawah baru, pembuatan saluran irigasi, pengembangan irigasi rawa dan optimalisasi bendungan air.

Investasi 2016-2017 diperkirakan membaik didukung oleh akselerasi investasi pemerintah. Peningkatan investasi tercermin dari meningkatnya proyek-proyek pemerintah. Kegiatan investasi diharapkan meningkat seiring dengan implementasi kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan stabilitas makroekonomi yang semakin baik. Peningkatan investasi bangunan terindikasi dari meningkatnya penjualan semen. Peningkatan investasi terkait dengan pembangunan beberapa proyek infrastruktur antara lain pengembangan pelabuhan Tanjung Berikat, pengembangan bandara Depati Amir, dan pengembangan pelabuhan Tanjung Batu, pembangunan rumah sakit, pembangunan hotel-hotel, pembangunan jembatan Teluk Kelabat, pembangunan jalan trans Bangka, pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Kelayang, dan proyek infrastruktur lainnya. Sementara itu, investasi swasta diharapkan akan meningkat seiring dengan dampak paket kebijakan pemerintah dan pemanfaatan ruang pelonggaran moneter secara terukur dengan tetap menjaga stabilitas makro.

2. PDRB Per Kapita

Peningkatan nilai PDRB Kepulauan Bangka Belitung yang tidak cukup signifikan, ditambah dengan belum adanya kebijakan pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk diperkirakan akan menyebabkan melambatnya pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2016, diperkirakan pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 49.084.582 atau tumbuh sebesar 1,05 persen dibandingkan tahun 2015. Pendapatan perkapita diperkirakan akan terus meningkat menjadi Rp 54.320.131 pada tahun 2017.

Gambar II.7
Perkembangan Pendapatan Per Kapita
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2014 – 2015 dan Proyeksi 2016 – 2017



Sumber: Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung, 2016

3. Struktur Perekonomian

Pada tahun 2016 diperkirakan tidak akan terjadi pergeseran struktur perekonomian dimana sektor industri pengolahan diikuti sektor pertanian, kehutanan, perikanan menjadi dua sektor dengan tingkat distribusi PDRB tertinggi. Namun pada tahun 2017, diperkirakan akan terjadi pergeseran dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan menjadi sektor dengan share PDRB tertinggi diikuti sektor industri pengolahan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Secara lengkap, proyeksi tentang distribusi PDRB berdasarkan pada lapangan usaha, adalah sebagaimana yang tersaji pada tabel II.16

Tabel II.16
Proyeksi terhadap Distribusi PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016–2017

Lapangan Usaha		2016	2017
(1)		(2)	(3)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,72	20,46
B.	Pertambangan dan Penggalian	12,76	11,01
C.	Industri Pengolahan	20,69	20,39
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,86	8,87
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	13,74	14,51
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,14	4,22
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,37	2,49
J.	Informasi dan Komunikasi	1,54	1,60
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	1,78
L.	Real Estate	3,25	3,36
M, N.	Jasa Perusahaan	0,28	0,29
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,01	6,10
P.	Jasa Pendidikan	2,86	2,89
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,18	1,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,72	0,73
PDRB		100,00	100,00

Sumber: Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung, 2016

4. Inflasi

Inflasi Bangka Belitung tahun 2016 - 2017 diperkirakan masih sesuai dengan sasaran yakni $4\pm 1\%$ (yoy). Inflasi tahun 2016 diperkirakan lebih tinggi dibanding inflasi 2015, namun masih dalam kisaran sasaran inflasi $4\%\pm 1\%$. Beberapa tekanan inflasi pada 2016-2017 dapat berasal dari i) gangguan cuaca hingga akhir tahun karena musim angin barat dan gelombang laut tinggi serta El nino yang lebih panjang di beberapa daerah produsen berpotensi menurunkan pasokan dan mengganggu arus distribusi; (ii) masih terbatasnya pasokan listrik; (iii) masih adanya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi global, (iv) rencana kenaikan listrik golongan 900 VA. Di sisi lain, risiko inflasi pada tahun 2016-2017 dapat diredam sehubungan relative stabilnya harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada lahirnya kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji.



Koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi akan terus diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan tekanan inflasi volatile food. Dalam jangka menengah untuk mencapai sasaran inflasi 2018 sebesar $3,5\pm 1\%$ diperlukan upaya memperkuat koordinasi Pengendalian inflasi volatile food dibawah 5%. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan Pemerintah perlu terus memperkuat Pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah agar inflasi tetap masuk dalam kisaran sasarannya. Selain itu, implementasi Roadmap Pengendalian Inflasi perlu segera diimplementasikan sebagai guidance bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan stabilitas harga di daerah.

5. Ketenagakerjaan

Pada 2016, diperkirakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) akan terus mengalami penurunan dibandingkan dengan 2015 yang berarti jumlah penduduk di Bangka Belitung yang aktif secara ekonomi mengalami penurunan. Sedangkan dilihat dari sisi pengangguran yang terlihat dari besaran TPT, tingkat pengangguran di Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan mengalami kenaikan. Naiknya tingkat pengangguran diakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor utama yang hal ini dikonfirmasi dengan porsi jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan yang terus mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 17,5 persen menjadi 12,24% pada 2015, sektor industri pengolahan turun dari 5,88% pada 2014 menjadi sebesar 5,65% pada 2015, sektor bangunan turun dari 5,16% pada 2014 menjadi sebesar 4,61% pada 2015.

Namun demikian, optimism tetap dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan target pengangguran pada tahun 2016 dan 2017. Peningkatan tenaga kerja di beberapa sektor dapat dijasikan suatu indikasi bahwa masih terbuka kesempatan dan peluang kerja yang lebih besar pada beberapa sektor tersebut.

Pada tahun 2014, tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 31,41 persen meningkat menjadi 36,63 pada tahun 2015. Meningkatnya harga beberapa komoditi sektor perkebunan seperti sawit, lada dan karet menjadi penyebab utama yang akan mendorong tenaga produktif untuk tertarik menggeluti sektor ini. Sementara itu pada sektor angkutan, pergudangan dan telekomunikasi meningkat dari 2,86% pada bulan 2014 menjadi sebesar 2,91% pada 2015, serta sektor jasa kemasyarakatan turun dari 14,35% pada bulan 2014 menjadi sebesar 15,70% pada 2015 dari total angkatan kerja menurut lapangan kerja utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sehingga TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 dan 2017 dapat ditekan tipis pada kisaran 5,1 – 5-5 persen.

6. Kemiskinan

Pada tahun 2016 dan 2017, angka kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan. Kondisi ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di daerah perdesaan mengingat di Kepulauan Bangka Belitung, angka kemiskinan tertinggi terjadi di daerah perdesaan.

Program pemerataan kesempatan usaha yang digulirkan pemerintah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyentuh masyarakat berpendapatan rendah. Program pembukaan lapangan kerja yang bersifat padat karya dapat terealisasi secara optimal. Selain itu program SATAM EMAS yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah memberikan dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan.

Diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2016 dapat ditekan menjadi 4,65 persen dan semakin menurun menjadi 4,53 persen pada tahun 2017.

7. Ketimpangan Regional

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di kabupaten tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Pada tahun 2016 dan 2017 upaya mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan konektivitas desa dan kota sebagaimana yang tercantum didalam visi dan misi provinsi.

Diperkirakan ketimpangan regional yang diukur dengan Indeks Williamson (IW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 akan semakin menurun berada pada 0,288 dan pada tahun 2017 diperkirakan menurun kembali pada 0,285 yang artinya pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin mendekati merata.

8. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Tingginya pekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tiadanya jaminan kepastian usaha di terhadap sektor yang digelutinya menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan indeks gini rasio, pada tahun 2014 adalah sebesar 0,30, mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,27. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat



ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah. Membaiknya kinerja sektor pertanian serta tumbuh pesatnya sektor jasa menjadi kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Perekonomian beberapa kabupaten yang mulai menunjukkan pertumbuhan yang baik diharapkan memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan masyarakatnya.

**BAB III****ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

Dalam penyusunan kebijakan umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 beberapa hal yang menjadi dasar antara lain :

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD
 - a. Proyeksi Ekonomi Makro
 - b. Proyeksi Kondisi Sosial Budaya
 - c. Lain-lain Asumsi

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan Dalam APBN

Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,5 persen-5,9 persen
2. Inflasi : 3 persen-5 persen
3. Kurs Rupiah : Rp 13.700-Rp 14.200 per dolar AS
4. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan : 5,5 persen-6,5 persen
5. Indonesian Crude Price (ICP) : US\$ 35-US\$ 45 per barel
6. Lifting minyak bumi : 740 ribu-750 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi : 1.050 ribu-1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Sebagai perbandingan, asumsi makro ekonomi Indonesia dalam APBN 2016

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,3 persen
2. Inflasi : 4,7 persen
3. Kurs Rupiah : Rp 13.900 per dolar AS
4. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan: 5,5 persen
5. ICP : US\$ 50 per barel
6. Lifting minyak bumi : 830 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi : 1.155 ribu barel setara minyak per hari



3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan APBD

3.2.1 Proyeksi Makro Ekonomi 2017

1. Pertumbuhan Ekonomi : 4,4 – 4,7%;
2. PDRB Per Kapita : Rp54.320.131;
3. Inflasi : 4±1%.

3.2.2 Proyeksi Kondisi Sosial Budaya

1. Pengangguran : 5,1%;
2. Kemiskinan : 4,53%;
3. Rata-rata Lama Sekolah : 8,11 Tahun;
4. Angka Harapan Hidup : 69,9 Tahun.

3.2.3 Lain-lain Asumsi

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2017.
2. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan.
3. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang – kurangnya 20 persen dari belanja daerah,
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang – kurangnya 10 persen dari total belanja,
5. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga kondusifitas keamanan dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan anggaran tahun 2017 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas;
- 2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;

- 3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD); dan
- 4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) daerah. Prioritas-prioritas pembangunan dalam RKPD, RPJM dan RPJP inilah yang akan menentukan pola alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber pembiayaannya yang ideal.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

4.1 Kebijakan Pembangunan

Memperhatikan bahwa tahun 2017 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017, maka Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diusung pada tahun 2017 adalah “Mewujudkan kemandirian, kemajuan, keadilan, daya saing dan pemerataan pembangunan antardaerah, antarkawasan pedesaan dan perkotaan”

Tema sebagaimana dimaksud memiliki makna:

1. Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan ekonomi.
2. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-



negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (good governance).

3. Berkeadilan adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra - sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.
4. Sinergitas dan konektivitas dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan.
5. Daya saing dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, maka pembangunan daerah tahun 2017 diarahkan pada upaya pemantapan ekonomi masyarakat dengan kemandirian dan keadilan diberbagai kawasan yang ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tahun kelima juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan antardaerah, antarkawasan pedesaan dan perkotaan.

Adapun sasaran pembangunan daerah tahun 2017 yang hendak dicapai adalah: sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen RKPD Tahun 2017 sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari sasaran tersebut. Adapun sasaran dan target sasaran tahun 2017 yang akan dicapai, disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel VI.1
Matriks Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2017
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita	Rp 54.320.131,-
Meningkatnya konsumsi masyarakat	Daya Beli Masyarakat (Rp)	12.399
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	18.282.358
Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67.08
	Persentase Wirausaha Baru (%)	1,00
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	0.265
	Indeks Williamson	0.285
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	77.32
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka melek huruf	98.50
	Angka rata-rata lama sekolah	8.11
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.90
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65.00
Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57
Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100.00
Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)	98.00
	Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%)	100.00
	Rasio Elektrifikasi (%)	97.75
Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%)	17.24
	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	1.00

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2017
(1)	(2)	(3)
Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Opini Audit BPK	WTP
	Penilaian akuntabilitas kinerja (skor)	70,00 (B)
	Indeks Reformasi Birokrasi	65.00
Terwujudnya pemerintahan yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	76.50

Guna pencapaian target sasaran diatas, maka dirumuskan suatu prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2017. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, yaitu:

- 1. Pengembangan *one village one product (OVOP)* dan koperasi komoditi**, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan ekonomi kerakyatan).
- 2. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata**, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
- 3. Penguatan *rural urban linkages***, prioritas ini dipilih untuk menurunkan disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).



4. **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan**, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dipilih untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
5. **Program SATAM EMAS** (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
6. **Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun**, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf, angka lama sekolah, angka partisipasi murni (APM) pendidikan, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk memenuhi kapasitas dan kualitas pendidikan. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
7. **Peningkatan pelayanan kesehatan**, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk memenuhi kapasitas dan kualitas kesehatan. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
8. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**, melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).
9. **Fasilitasi reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang**, melalui pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk menjaga

kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).

- 10. Pengendalian pemanfaatan ruang**, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk meningkatkan ketaatan terhadap tata ruang. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).
- 11. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah**, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh).
- 12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil**, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh).
- 13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur**, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan menguatkan tata kelola pemerintah daerah. Hal ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 5 RPJMD (Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean government*).

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2012-2017;



- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2017;
- 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

4.2 Pendapatan Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2017 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui:

- 1) Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- 2) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
- 3) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 4) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;



- 5) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
- 6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- 7) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
- 2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah:

- 1) Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD:
 - a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat *Outlet*;
 - e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;
 - f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;



- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
 - j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.
- 2) Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:
- a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - c) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - d) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang didalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai yang tertuang pada Tabel IV.2.



Tabel IV.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 s.d tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015 (N-1)	Proyeksi / Target 2016 (N)	Proyeksi / Target 2017 (N+1)	Proyeksi / Target 2018 (N+2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah	558.971.218.953,54	581.397.810.824,26	666.837.986.746,16	666.837.986.746,16
1.1.1	Pajak daerah	500.844.014.371,82	509.130.376.289,67	557.198.425.109,57	557.198.425.109,57
1.1.2	Retribusi daerah	8.445.970.286,00	8.886.514.493,56	15.373.205.014,87	15.373.205.014,87
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.500.000.00,00	5.613.342.583,77	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	42.181.234.295,72	57.767.577.457,26	87.766.356.621,72	87.766.356.621,72
1.2	Dana perimbangan	1.179.487.500.000,00	1.430.773.316.000,00	1.554.746.797.999,00	1.554.746.797.999,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	226.155.287.000,00	130.875.389.000,00	130.875.389.999,00	130.875.389.999,00
1.2.2	Dana alokasi umum	897.887.443.000	905.526.208.000,00	1.175.526.208.000,00	1.175.526.208.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	55.444.770.000,00	394.371.719.000,00	248.345.200.000,00	248.345.200.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	179.626.400.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	179.626.400.000,00	179.626.400.000,00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	-
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah (1.1 +1.2+1.3)		1.918.085.118.953,54	2.017.171.126.824,26	2.231.584.784.745,16	2.231.584.784.745,16



4.3 Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalandengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.
 - c) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semipemerintah (PMI, KONI, dan Pramuka), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah



- lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- d) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
 - e) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
 - f) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus seperti Program Satam Emas dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan.
 - g) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan dalam rangka **pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan urusan dan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi**, terdiri dari jenis belanja:
- a) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
 - b) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan biaya pemeliharaan untuk digunakan dalam kegiatan belanja investasi daerah.

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat. Karena esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan holistik tematik, integrative dan spasial pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2017 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 4) Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan:”Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixedcost*, *regularcost*, dan *variablecost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
 - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;
 - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD;
 - d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committedbudget*).



- 6) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi 2012-2017, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
- 8) Menganggarkan kembali kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2016 namun ditunda pelaksanaannya dikarenakan terdapat prioritas-prioritas daerah yang lebih mendesak (Pemilukada dan Pasca Banjir).

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel IV.3 berikut:



Tabel IV.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 s.d Tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah			
		Proyeksi / Target 2015 (N-2)	Proyeksi / Target 2016 (N-1)	Proyeksi / Target 2017 (N)	Proyeksi / Target 2018 (N+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.152.668.096.324,74	1.311.959.122.367,45	1.401.145.581.332,78	1.401.145.581.332,78
2.1.1	Belanja pegawai	329.023.179.838,35	429.926.074.527,94	664.022.331.938,74	664.022.331.938,74
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	1.000.000.000,00	-	-
2.1.4	Belanja hibah	284.091.950.000,00	407.111.744.574,00	304.628.000.000,00	304.628.000.000,00
2.1.5	Belanja bantuan social	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	988.000.000,00	988.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	280.474.272.314,38	157.738.163.425,51	285.636.549.394,04	285.636.549.394,04
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	256.078.694.72,00	312.183.139.840,00	135.870.700.000,00	135.870.700.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.152.668.096.324,74	1.311.959.122.367,45	1.401.145.581.332,78	1.401.145.581.332,78
2.2	Belanja Langsung	977.894.380.560,50	1.042.905.799.306,42	1.199.048.530.621,33	1.199.048.530.621,33
2.2.1	Belanja pegawai	91.216.604.900,00	105.050.534.080,00		
2.2.2	Belanja barang dan jasa	575.987.487.344,50	605.139.780.708,62		
2.2.3	Belanja modal	310.690.288.316,00	332.715.484.517,80		
	Jumlah Belanja Langsung	977.894.380.560,50	1.042.905.799.306,42	1.199.048.530.621,33	1.199.048.530.621,33
	Total Jumlah Belanja	2.130.562.476.885,23	2.354.864.921.673,87	2.600.194.111.954,12	2.600.194.111.954,12

4.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebagaimana yang tergambar pada Tabel IV.4, diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2017;
- 2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
- 3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- 4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.



Tabel IV.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s.d Tahun 2018

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015 (N-2)	Proyeksi / Target 2016 (N-1)	Proyeksi / Target 2017 (N)	Proyeksi / Target 2018 (N+1)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan	227.501.516.638,72	337.693.794849,61	368.609.327.208,96	368.609.327.208,96
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	227.501.516.638,72	337.693.794.849,61	368.609.327.208,96	368.609.327.208,96
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	227.501.516.638,72	337.693.794849,61	373.609.327.208,96	373.609.327.208,96
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	227.501.516.638,72	337.693.794849,61	368.609.327.208,96	368.609.327.208,96
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkala (SiLPA)	227.501.516.638,72	-	-	-



BAB V
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 ini disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Pangkalpinang, 02 November 2016

Plt. GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149

Website : bappeda.babelprov.go.id

Email : bappeda.provbabel@yahoo.com